

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN BUDAYA STRATEGIS *CONFUCIAN PACIFISM* DALAM DIPLOMASI KEAMANAN TIONGGOK TERHADAP ASEAN PASCA PERANG DINGIN

Pasca berakhirnya Perang Dingin, Tiongkok tampil dengan karakteristik diplomasi keamanan yang berbeda dengan sebelumnya pada era Perang Dingin. Deferensiasi karakteristik diplomasi tersebut diterapkan seiring dengan kembalinya *Confucian Pacifism* dalam tradisi berfikir, dan dalam proses pengambilan kebijakan Tiongkok. Diplomasi keamanan *ala Confucian Pacifism* turut serta memengaruhi preferensi strategis Tiongkok dalam konteks kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanannya dalam kontestasi hubungan internasionalnya.

Pengarusutamaan norma-norma dan prinsip-prinsip budaya strategis *Confucian Pacifism* dalam diplomasi keamanan Tiongkok turut serta memengaruhi preferensi *role model* diplomasi keamanan Tiongkok baik secara regional maupun global. Dalam hal ini, *Confucian Pacifism* bagi para pengambil kebijakan Tiongkok, dianggap sebagai ideologi diplomasi utama Tiongkok (*China's primary diplomatic ideology*). Mengingat sentralitasnya dalam memengaruhi preferensi-preferensi strategis Tiongkok dalam upayanya untuk mewujudkan kepentingan keamanannya di kawasan, dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan regional, guna memelihara tatanan perdamaian dan ketertahan di kawasan

Berlandaskan pada *role model* diplomasi keamanan ala *Confucian Pacifism* tersebut, Tiongkok begitu “percaya diri” tampil dengan *role model* diplomasi keamanan barunya yang notabene berkarakteristik *non-Cultural Realism (anti-militarist)* dalam merespon berbagai isu-isu dan persoalan-persoalan keamanan di kawasan. Bertolak belakang dengan preferensi *role model* diplomasi keamanannya pada era Perang Dingin yang notabene berkarakteristik *Cultural Realism (militarist)*. Perubahan preferensi *role model* tersebut secara operasional akan terrefleksikan tentunya dalam praktik-praktik kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanan Tiongkok.

A. Kembalinya *Confucian Pacifism* sebagai Budaya Strategis Tiongkok Pasca Perang Dingin

Dalam bukunya *Menuju Kekuatan Utama Dunia: Sekilas Politik Luar Negeri Cina*, Nur Rachmat Yuliantoro⁶⁹ menjelaskan bahwa pasca berakhirnya Perang Dingin, ditandai dengan kembalinya budaya strategis *Confucian Pacifism* ke dalam tradisi berfikir dan pengambilan kebijakan para pemimpin Tiongkok (*decisions-making processes*)⁷⁰. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya realitas bahwa, tradisi budaya Tiongkok begitu berpengaruh dalam *soft power*-nya, sekaligus turut memengaruhi diplomasi dan politik luar negerinya. Dengan kembalinya *Confucian Pacifism* tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap strategi diplomasi dan kebijakan

⁶⁹ Nur Rachmat Yuliantoro merupakan Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM). Yuliantoro memperoleh gelar M.A. dan Ph.D dalam bidang *Asian Studies* dari *Flinders University*, Australia. Yuliantoro merupakan pakar studi tentang Politik Cina, Politik Amerika Serikat (AS) dan Korupsi Politik Universitas Gadjah Mada.

⁷⁰ Nur Rachmat Yuliantoro, *op.cit.*, hal. 51-55.

keamanan Tiongkok dalam konteks hubungan internasionalnya dengan negara-negara tetangganya.

Confucian Pacifism pernah menjadi ajaran utama (*mainstream*) Tiongkok Imperial. Bahkan sempat menjadi ideologi negara (*ideology of state*), namun terabaikan sejak tahun-tahun pertama abad ke-20 seiring dengan revivalisme sentimen nasionalisme Tiongkok. Selain itu, pada awal tahun 1970-an, ketika revolusi Maoisme dengan jargon komunismenya menjadi “mantra” yang tidak terbantahkan, Tiongkok bahkan melancarkan kampanye pelarangan ajaran *Confucian pacifism* sebagai upayanya untuk memperkuat identitas dan keunggulan (*primacy*) komunisme Tiongkok mengingat pada saat itu, komunisme menjadi ideologi negara yang sah. Akibatnya, tradisi berfikir *ala Confucian Pacifism* digantikan oleh tradisi berfikir yang disebut dengan budaya strategis *Cultural Realism*. Oleh karenanya, strategi diplomasi dan kebijakan keamanan Tiongkok cenderung *militarism, use of force, offensive grand strategy, violent means*, dan *expansionist* untuk mencapai kepentingan keamanannya.

Bahkan hingga tahun 1980-an, *Confucian Pacifism* juga tidak mendapatkan tempat utama dalam tradisi berfikir dan pengambilan kebijakan para pemimpin Tiongkok. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, dengan jargon pragmatismenya, budaya strategis *Cultural Realism* dan *Structural Realism* silih berganti menjadi hal yang tak terbantahkan, dan *mainstream* dalam menjalankan strategi diplomasi dan kebijakan keamanan luar negerinya. Hal itu nampak terlihat dari model

pendekatan yang diambil dalam merumuskan strategi diplomasi dan kebijakan keamanannya yang cenderung sama dengan pendahulunya Mao, *militarism, use of force, offensive grand strategy, violent means* dan *expansionist*. Namun di satu sisi, mengedepankan prinsip-prinsip pragmatisme dalam mencapai tujuan-tujuan keamanannya.

Namun, pasca berakhirnya Perang Dingin, di bawah kepemimpinan Jiang Zemin, Tiongkok mengalami sebuah transformasi besar dalam konteks politik luar negerinya khususnya terkait dengan keamanan dan pertahanannya. Tiongkok menyadari bahwa budaya strategis *Cultural Realism* yang berorientasi pada strategi *hard power* dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan *militarism, use of force, offensive grand strategy, violent means* dan *expansionist* ternyata telah gagal dalam mencapai tujuan-tujuan keamanannya. Konsekuensinya, Tiongkok secara regional dialienasikan, “dikucilkan” dan “dimusuhi” oleh negara-negara di kawasan sebagai akibat dari ekspansionisme dan hegemonismenya dalam mewujudkan tujuan-tujuan keamanan luar negerinya di kawasan.

Menyadari hal tersebut, seiring dengan kembalinya *Confucian Pacifism* sebagai budaya strategisnya, Tiongkok secara gradual mulai mengubah model pendekatan kebijakan dan diplomasi keamanannya yang berbasiskan pada strategi *soft power diplomacy* yang *anti-militarism* dan *non-realism security*, hal-hal yang tidak terkait dengan konsepsi keamanan Realis (*offensive realism*), dengan mengedepankan model-model pendekatan keamanan *non-militarism, non-use of force, defensive grand*

strategy, no power politics, non-violent means dan *non-expansionist* dalam mencapai tujuan-tujuan keamanannya seiring dengan perubahan lingkungan strategis keamanan internasional pasca Perang Dingin. Sebagaimana ditegaskan oleh Jiang Zemin dalam sebuah pidatonya pada Kongres Partai Nasional Partai Komunis Tiongkok (PKC) ke-15 September 1997, sebagai berikut yaitu:

Beijing harus memiliki hubungan yang baik dengan dengan negara-negara sekitarnya (*peaceful co-existence*). Hal ini tidak dapat dicapai dengan kekuatan militer (*offensive grand strategy*), tetapi dengan memperluas pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok di kawasan (*soft power diplomacy*)⁷¹.

Untuk itu, maka Tiongkok harus menghindari sebisa mungkin potensi munculnya peperangan dan pecahnya konflik terbuka dengan para mitra-mitranya seraya dengan mengurangi faktor-faktor munculnya potensi eskalasi konflik tersebut, dan perselisihan yang telah ada, demi sumbangsih perdamaianya kepada masyarakat dunia⁷².

Seiring dengan suksesi kepemimpinan politik dari Jiang Zemin menuju Hu Jintao (2003-2008), Tiongkok di bawah kepemimpinan Hu menjalankan politik luar negeri yang cenderung *status quo* sebagai warisan dari pendahulunya Jiang. Terkait dengan pencapaian tujuan keamanan luar

..... Tiongkok juga tidak melakukan orientasi strategis (*revisionist*

policy) terhadap postur kebijakan dan diplomasi keamanan luar negerinya terhadap negara-negara di kawasan. Tiongkok tetap membangun struktur hubungan keamanan luar negerinya berbasiskan pada *pakem* Jiang yang sangat *Confucian* sebagai konsekuensi kembalinya *Confucian Pacifism* sebagai budaya keamanan Tiongkok dalam mencapai tujuan-tujuan keamanannya di abad ke-21 saat ini.

Kembalinya *Confucian Pacifism* sebagai *role-model* kebijakan dan diplomasi keamanan luar negeri Tiongkok merupakan suatu hal yang seyogyanya wajar terjadi. Mengingat Tiongkok sebagai sebuah negara peradaban (*civilizational state*) sejak *ancient China* sudah mengadopsi *Confucian Pacifism* sebagai ideologi resmi negara, dan terbukti mampu menjadikan Tiongkok sebagai sebuah negara peradaban yang unggul dan terhormat di mata para negara tetangganya.

1. Pengaruh *Confucian Pacifism* dalam Diplomasi Keamanan Baru Tiongkok Pasca Perang Dingin

Dalam bukunya *Chinese Strategic Culture and Foreign Policy Decision-Making: Confucianism, Leadership and War*, Huiyun Feng menjelaskan bahwa, seiring dengan kembalinya *Confucian Pacifism* sebagai budaya strategis Tiongkok pasca Perang Dingin, praktis berpengaruh terhadap model strategi kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanannya. Pengaruh tersebut tercermin dari perubahan-perubahan preferensi model pendekatan yang

kepentingan keamanannya. Perubahan preferensi tersebut diperkenalkan oleh Tiongkok melalui penerapan model diplomasi keamanan barunya yang disebut dengan *New Security Concept* (NSC) sebagai model pendekatan baru keamanannya. NSC secara fundamental merupakan ekstraksi norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanan (*security culture*) *Confucian Pacifism* yang diadopsinya sebagai model pendekatan baru diplomasi keamanannya pasca Perang Dingin. Dengan peran serta NSC tersebut, tentunya akan berpengaruh terhadap pembentukan strategi keamanan baru Tiongkok bagi para pemimpin-pemimpinnya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanannya⁷³.

Dalam tulisannya *The Dragon, The Bull and The Ricestalks: The Roles of China and India in Southeast Asia*, Chulaceeb Chinwanno menjelaskan bahwa pasca berakhirnya Perang Dingin pada permulaan tahun 1990-an, Tiongkok menyadari bahwa seiring dengan perubahan strategis *landscape* sistem internasional yang ditandai dengan runtuhnya komunisme Uni Soviet, dan tampilnya Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon. Selain itu, globalisasi dan pesatnya perubahan teknologi memengaruhi lingkungan internasional dan keamanan. Merespon hal tersebut, Tiongkok mulai me-re-interpretasi konsepsi keamanannya dengan mengembangkan dan mengartikulasikan

sebuah konsep keamanan baru yang disebut dengan *New Security Concept* (NSC), dari model pendekatan yang *hard power diplomacy* menuju *soft power diplomacy* dengan tujuan mengeliminasi *cold war thinking* yang *mainstream Cultural Realism* dengan memperluas interpretasi konsepsi keamanannya dengan mengedepankan strategi *non-militarism, defensive grand strategy, non-violent means* dan *non-expansionist*.

NSC merupakan seruan internasional Tiongkok untuk membangun sebuah arsitektur baru keamanan internasional pasca Perang Dingin. Sebagaimana diungkapkan oleh Hu Jintao dan Wen Jiabao dalam lawatan diplomatiknya ke Indonesia tahun 2000 pada Forum *Indonesian Council on World Affairs* (ICWA), bahwa Tiongkok mengembangkan dan mendorong sebuah *grand design* NSC sebagai model pendekatan baru diplomasi keamanannya sebagai berikut yaitu:

*A new security concept (NSC) that embraces the principles of equality, dialogue, trust and cooperation, and a new security order should be established to ensure genuine mutual respect, mutual cooperation, consensus through consultation and peaceful settlement of disputes, rather than bullying, confrontation and imposition of one's own will upon others. Only in that way, countries can co-exist in amity and secure their development*⁷⁴.

⁷⁴ Chulacheeb Chinwanno. "The Dragon, the Bull and the Ricestalks: The Roles of China and India

Konsep Keamanan Baru Tiongkok, berdasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, dialog, kepercayaan dan kerjasama, dan merupakan arsitektur keamanan baru yang dibentuk untuk memastikan terwujudnya rasa saling menghormati, membangun hubungan kesalingkerjasama, membentuk konsensus melalui konsultasi (musyawarah mufakat), dan penyelesaian konflik secara damai, daripada menggunakan ancaman kekerasan, konfrontasi dan memaksakan kehendak pada yang lain. Hanya melalui langkah-langkah tersebut, negara-negara dapat hidup berdampingan secara damai dalam hubungan persahabatan dan mengamankan pembangunannya.

Menurut NSC, diplomasi keamanan Tiongkok ditujukan untuk mencapai dan melindungi kepentingan keamanannya melalui model pendekatan *non-militarism* dan *peaceful means* yaitu: dialog dan kerjasama atau koordinasi berdasarkan pada *confidence building measures* (CBMs) yaitu: rasa saling percaya satu sama lainnya (*mutual trust*), prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*), prinsip kesetaraan dan konsultasi. Secara fundamental, NSC itu sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya peperangan dan timbulnya konflik-konflik melalui upaya-upaya perdamaian (*non-violent means*) seperti *confidence building measures* (CBMs), dialog dan konsultasi. Mengingat NSC memandang bahwa penggunaan

instrumentasi kekuatan (*doctrine of use of force*) atau ancaman penggunaan kekerasan secara fundamental tidak dapat menyelesaikan berbagai konflik-konflik yang terjadi dan tantangan-tantangan keamanan. Oleh karenanya, NSC menolak tegas penggunaan *confrontational approach style* dan pembentukan blok-blok militer maupun ide-ide mengenai konsepsi keamanan absolut (*absolute security*)⁷⁵.

Menurut NSC, kepentingan bersama (*common interests*), instrumentasi non-militer (*non-military capability*), adalah prasyarat bagi terwujudnya sebuah keamanan. Sedangkan CBMs, *no military balance* atau *no military deterrence* adalah instrumen atau cara untuk mewujudkan keamanan itu sendiri⁷⁶. NSC sendiri merupakan sebuah pandangan tentang pembangunan hubungan kerjasama keamanan jangka panjang dan prinsip-prinsip penghormatan atas kepentingan-kepentingan praktis negara lainnya⁷⁷.

Selain itu, NSC juga mendorong negara-negara untuk membangun rasa saling percaya melalui konsultasi dan mewujudkan keamanan nasionalnya melalui instrumentasi koordinasi. Secara fundamental, *New Security Concept*⁷⁸ mengatur tentang hal-hal sebagai berikut yaitu:

⁷⁵ Gao Fei. "The Shanghai Cooperation Organization and China's New Diplomacy." Discussion Papers in Diplomacy. 2010, p. 2-3.

⁷⁶ Huiyun Feng, *op.cit.*, p. 84.

⁷⁷ Gao Fei, *op.cit.*, p. 3.

⁷⁸ "China's Foreign and Security Policy: Partner or Rival?" *China: The Balance Sheet: What the World Needs to Know Now About the Emerging Superpower*. Ed. C. Fred Bergsten, et al. Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington and Peterson Institute for International

1. *Adherence to the Five Principles of Peaceful Co-existence such as Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty (doctrine of non-expansionist), Mutual non-aggression (defensive grand strategy), Mutual non-interference in each other's internal affairs (doctrine of non-interference), Equality and mutual benefit and Peaceful co-existence.*
2. *Emphasis on mutually beneficial economic cooperation among states.*
3. *Pursuit of confidence building measures (CBMs) amongst states (non-violent means).*
4. *Establishment of bilateral strategic partnership that are not directed at any third country.*

Menurut perspektif Tiongkok, konsepsi keamanan bukan hanya menyangkut dimensi kapabilitas militer (*military security*). Namun persoalan keamanan tidak dapat dipisahkan dari hal-hal seperti stabilitas politik (*political security*), pembangunan ekonomi (*economic security*) dan harmoni sosial (*societal security*). Yang Yani, Deputi Direktur Jenderal Departemen Perencanaan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Tiongkok secara esensial mengelaborasi NSC dengan karakteristik sebagai berikut yaitu: *mutual trust, mutual benefit, equality, dan coordination (non-*

Tiongkok meyakini bahwa dengan membangun dialog secara berkala (*frequent dialogue*), dan koordinasi timbal-balik (*mutual briefings*) satu sama lainnya menyangkut kebijakan keamanan dan pertahanan, akan mampu berkontribusi pada peningkatan derajat kepercayaan dan tingkat kenyamanan (*comfort level*) para aktor, dan mendorong terciptanya niatan baik (*good-will*) dan kepercayaan.

Disamping mengupayakan terciptanya lingkaran kepercayaan, prinsip saling menguntungkan juga harus diadvokasi melalui mekanisme multilateral. Terhadap hal tersebut, Tiongkok memandang bahwa selain memastikan kepentingan keamanannya, Tiongkok juga harus menghormati kepentingan keamanan pihak-pihak lainnya. Selain itu, prinsip-prinsip kesetaraan juga harus dikedepankan, negara besar atau negara kecil, kuat atau lemah, harus menegakkan norma-norma dan prinsip-prinsip yang secara universal diakui legalitasnya, terutama menyangkut prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan (*principles of sovereignty equality*), tidak mencampuri urusan domestik negara lain (*doctrine of non-interference*), dan mengedepankan penyelesaian konflik-konflik internasional secara damai (*pacific settlement of disputes*). Secara operasional, yang terpenting, Tiongkok “menomersatukan” pendekatan dialog dan konsultasi (*non-violent way*), daripada menggunakan cara-cara

kekerasan dan konfrontasi (*doctrine of non-use of force*) dalam merespon berbagai persoalan-persoalan keamanannya⁷⁹.

Dalam tulisannya *Strengthening ASEAN-China Cooperation in The ASEAN Regional Forum*, Liu Xuecheng menjelaskan bahwa, Tiongkok pasca Perang Dingin secara konsisten telah mendorong negara-negara di kawasan tanpa terkecuali negara-negara di Asia Tenggara (*ASEAN's members*) untuk turut serta mengadopsi dan menerapkan NSC yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya melalui dialog dan mempromosikan keamanan melalui mekanisme kerjasama. NSC telah menjadi komponen penting dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanannya, dan rasa saling percaya, saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan kerjasama merupakan prinsip-prinsip dasar yang ditegakkan oleh NSC. Dengan kata lain, NSC dalam konteks diplomasi keamanan Tiongkok, telah menjadi apa yang disebut dengan *China's primary diplomatic ideology* atau ideologi diplomasi utama Tiongkok.

Tiongkok juga telah berusaha keras untuk menerapkan norma-norma dan prinsip-prinsip NSC ke dalam tindakan operatif kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanannya. Tiongkok telah berupaya untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dengan norma tetangga melalui negosiasi perdamaian dan resolusi

berbagai persoalan-persoalan keamanan terkait dengan tapal batas yang notabene mayoritas aktor-aktor yang berkonflik adalah negara-negara tetangga Tiongkok sendiri. Tiongkok juga antusias mendukung dan berupaya untuk membangun dan mengembangkan sebuah mekanisme kerjasama keamanan kawasan melalui pembentukan sebuah arsitektur keamanan kawasan (*regional security framework*) yang berlandaskan pada mekanisme dialog dan kerjasama. Tiongkok percaya bahwa jaminan utama terciptanya keamanan kawasan adalah terbentuknya arsitektur keamanan kawasan yang lebih mengedepankan kerjasama dibandingkan dengan konfrontasi⁸⁰.

2. Akses Tiongkok terhadap Traktat TACSA ASEAN

Pada 8 Oktober 2003 bertepatan dengan momen Pertemuan Puncak ASEAN dan Tiongkok, Perdana Menteri (PM) Tiongkok Wen Jiabao turut serta dalam Pertemuan Puncak ASEAN-Tiongkok ke-7 (*The 7th ASEAN-China Summit*) yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Wen menyatakan kesediaan Tiongkok untuk terikat pada kerangka kerjasama keamanan ASEAN, atau yang lebih familiar dikenal dengan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TACSA). Kesediaan niat baik tersebut dibuktikan dengan diaksesnya TACSA oleh

⁸⁰ Liu Xuecheng. "Strengthening ASEAN-China Cooperation in the ASEAN Regional Forum." *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*. Ed. Saw Swee Hock, Sheng Lijun and Chin Kin Wah. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapore, 2005. p. 43-44.

Tiongkok dalam momen perayaan penandatanganan TACSA pada Pertemuan Puncak Tiongkok-ASEAN tersebut.

Melalui Menteri Luar Negerinya Li Zhaoxing disaksikan oleh seluruh Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN serta sejumlah pemimpin ASEAN lainnya, Tiongkok secara resmi menandatangani instrumen aksesori TACSA. Keputusan Tiongkok tersebut secara politik sepenuhnya telah disetujui dan didukung oleh seluruh *signatory parties* TACSA yaitu: ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina), Brunei Darussalam dan Negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam). Dengan demikian, Tiongkok secara definitif legal-konstitusional telah terikat atau/ menjadi bagian dalam arsitektur keamanan kawasan Traktat TACSA ASEAN⁸¹.

Aksesinya terhadap TACSA tersebut mengimplikasikan keikutsertaan Tiongkok sebagai peserta secara keseluruhan Traktat tersebut, berdasarkan itikad baik dengan penerimaan penuh dan utuh atas semua ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Traktat tersebut. Selain itu, tindakan aksesori Tiongkok juga merupakan bukti keikutsertaannya dalam Traktat TACSA dengan status yang sama (*equal*) dengan para penandatangan-penandatangan aslinya (*signatory parties*) yaitu ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *plus* Brunei Darussalam, Negara-negara

CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) dan Papua New Guinea.

Dengan keterikatannya pada Traktat tersebut, Tiongkok setuju untuk berperilaku dan melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Traktat tersebut, mengingat tujuan dibentuknya Traktat tersebut adalah untuk mempromosikan perdamaian “abadi”, menjalin hubungan persahabatan yang “langgeng” dan membangun hubungan kerjasama yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, sikap tidak saling mencampuri urusan domestik negara lain dan penyelesaian konflik secara damai⁸².

Selain itu, langkah Tiongkok untuk mengaksesi Traktat TACSA ASEAN tersebut merupakan upaya Tiongkok untuk menciptakan kondusivitas bagi keberlangsungan jangka panjang stabilitas dan pembangunan hubungan bilateral keduanya antara Tiongkok dan ASEAN maupun guna mewujudkan upaya pemeliharaan stabilitas dan perdamaian kawasan⁸³

Dalam konteks ini, dalam tulisannya *China's Policy of Good-Neighborliness and China-ASEAN Relations*, Cao Yunhua dan Xu Shanbao menjelaskan bahwa signifikansi aksesinya Tiongkok

⁸² *China Accedes to Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. 8 October 2003. 22 Desember 2014. <www.china-embassy.org/eng/xw/t34707.htm>.

⁸³ *China Joins Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. 8 October 2003. 18 November 2014. <www.china-embassy.org/eng/xw/t34707.htm>.

terhadap Traktat TACSA ASEAN tersebut adalah bahwa Tiongkok ingin menunjukkan pada masyarakat internasional tanpa terkecuali di kawasan Asia Tenggara bahwa Tiongkok setuju dan bersedia untuk membangun struktur hubungan keamanannya dengan negara-negara lainnya (*state-to-state relations*) melalui mekanisme atau instrumen Traktat internasional atau kaidah-kaidah hukum internasional lainnya. Selain itu, Tiongkok juga ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa Tiongkok setuju dan bersedia untuk memberlakukan norma-norma dasar yang mengatur konstelasi hubungan internasional antar negara (*basic norms governing international relations*), mengingat secara substansial Traktat TACSA ASEAN tersebut mengatur dan memberlakukan hal-hal tersebut, sebagai bentuk harmonisasi hubungan hak dan kewajiban yang diatur dan diciptakannya bagi setiap pihak yang terikat pada Traktat tersebut⁸⁴.

Sebelum Tiongkok memutuskan untuk menjalin kerjasama keamanan dengan ASEAN melalui mekanisme Traktat TACSA ASEAN tersebut, pada Juni 2003, Badan Legislatif Tertinggi Tiongkok (*The Highest Legislative Body*) Kongres Rakyat Nasional (*The National People's Congress (NPC)* atau/ KRN) melalui *The Standing Committee*-nya terlebih dahulu telah memberikan dukungan politiknya dengan menyetujui keputusan Tiongkok

(pemerintah) untuk terikat pada arsitektur keamanan kawasan tersebut, dengan mengaksesi Traktat TACSA ASEAN tersebut⁸⁵.

Keterlibatan Tiongkok dalam arsitektur keamanan kawasan, Traktat TACSA ASEAN tersebut, merupakan suatu bentuk legitimasi Tiongkok terhadap legalitas *code of conduct* (kode etik) struktur hubungan keamanan antar negara-negara di kawasan, dan merupakan tonggak terpenting dari kerjasama ASEAN. Tiongkok juga tidak terlalu memproblematisasi substansi dan implikasinya. Meskipun ASEAN tidak memiliki mekanisme ataupun kemampuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menandatangani Traktat TACSA ASEAN tersebut akan selalu menaati norma-norma dan prinsip-prinsip keamanan yang terkandung di dalamnya (*pacta sunt servanda*)⁸⁶.

Dengan diaksesinya TACSA oleh Tiongkok tersebut, praktis *pertama*, menjadikannya sebagai *a major power* pertama yang terikat pada mekanisme kerjasama keamanan kawasan tersebut. *Kedua*, keterikatan Tiongkok pada instrumentasi TACSA menjadikannya sebagai mitra dialog dan konsultasi ASEAN pertama yang terikat pada mekanisme kerjasama keamanan ASEAN tersebut. *Ketiga*, dengan diaksesinya TACSA oleh Tiongkok, praktis

⁸⁵ Jianwei Wang. "China's Multilateral Diplomacy in the New Millenium." *China Rising: Power and Motivation in Chinese Foreign Policy*. Ed. Yong Deng and Fei Ling Wang. United States of America: Rowman & Littlefield Publisher, 2005, p. 171. Lihat juga *China Joins Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. 9 October 2003. 18 November 2014. <http://english.peopledaily.com.cn/200310/08/eng20031008_125556.shtml>.

⁸⁶ Ratna Shofi Inayati. "Tata Politik dan Ekonomi Regional ASEAN-Cina." Afadlal, et al. *Ekonomi dan Politik Regional ASEAN: Sebuah Perspektif Kritis*. Ed. Rahedhian T. Akbar. Ist. Yogyakarta:

juga menjadikannya sebagai *signatory party non-Southeast Asian states* kedua setelah Papua New Guinea pada 5 Juli 1989.

Bagi ASEAN, aksesinya Tiongkok terhadap TACSA merupakan sebuah *cornerstone* dan *milestone* bagi upaya perwujudan keamanan kawasan. Mengingat Tiongkok sebagai *a leading regional power* atau *a regional power house* di kawasan, sekaligus merupakan *key player* yang tidak dapat dikesampingkan dalam upaya mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Stabilitas politik dan keamanan kawasan sedikit tidak akan senantiasa melibatkan Tiongkok mengingat pengaruh dan kontribusinya yang begitu signifikan bagi upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian kawasan. Di masa mendatang, dengan suatu “langkah besar” Tiongkok ini, akan mampu mendorong pihak-pihak di luar sana untuk bersedia terikat pada mekanisme kerjasama keamanan TACSA guna berkontribusi positif dan konstruktif bagi upaya perwujudan keamanan dan pemeliharaan perdamaian di kawasan.

B. Harmoni Budaya Strategis *Confucian Pacifism* dengan Traktat TACSA ASEAN

Terkait dengan keputusan Tiongkok untuk menjalin kerjasama keamanan dengan ASEAN melalui keterikatannya dalam arsitektur keamanan kawasan Traktat TACSA ASEAN, tidak dapat terlepas dari adanya faktor harmonisitas antara budaya keamanan Tiongkok dan

Pacifism dengan Traktat TACSA ASEAN itu sendiri. Harmonisitas tersebut terrefleksikan dalam empat hal yang melatarbelakangi Tiongkok memutuskan untuk mengaksesi Traktat TACSA ASEAN tersebut. Berikut di bawah ini, eksplanasi lebih lanjut mengenai empat hal tersebut.

1. Konformitas *New Security Concept* Tiongkok dengan Traktat TACSA ASEAN

Dalam tulisannya *Non-Traditional Security And China-ASEAN Relations: Cooperation, Commitments And Challenges*, Cai Peng Hong menjelaskan bahwa faktor penyebab Tiongkok memutuskan untuk mengaksesi Traktat TACSA ASEAN tersebut adalah karena adanya konformitas (*conformity*) antara konsepsi keamanan barunya *New Security Concept* (NSC) dengan Traktat TACSA ASEAN⁸⁷. Bagi Tiongkok, keputusannya menjalin kerjasama keamanan melalui aksesinya terhadap Traktat TACSA ASEAN, sebagaimana prinsip-prinsip dan tujuan dibentuknya Traktat TACSA ASEAN tersebut yaitu: menghormati kedaulatan setiap negara (*principles of sovereignty equality*), kemerdekaan (*mutual respect for the independence*), tidak turut serta campurtangan dalam urusan-urusan dalam negeri (domestik) setiap negara (*non-interference in the internal affairs of one another*), pelarangan pemberlakuan ancaman atau penggunaan kekuatan

⁸⁷ Cai Peng Hong. "Non-Traditional Security and China-ASEAN Relations: Cooperation, Commitments and Challenges." *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*. Ed. Ho Khai Leong and Samuel C. Y. Ku. Singapore: Institute of Southeast Asian

(*renunciation of the threat or use of force*), dan penyelesaian konflik-konflik yang terjadi secara damai (*settlement of differences or disputes by peaceful means*), keseluruhan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan TACSA tersebut konsisten (*consistency*) dan sejalan (*in line*) dengan model kebijakan dan diplomasi keamanan Tiongkok sebagaimana tercermin dalam konsepsi keamanan barunya *New Security Concept* (NSC) dan harmoni dengan semangat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the Charter of United Nations*) yang sejauh ini dijunjungtinggi dan dipegangteguh oleh Tiongkok dalam menjalankan kebijakan dan diplomasi keamanannya. Semangat piagam PBB tersebut termanifestasikan dalam *four doctrine* yaitu: *doctrine of non-interference, doctrine of non-expansionist, doctrine of non-use of force*⁸⁸ dan *doctrine of pacific settlement of dispute*⁸⁹. Lebih lanjut, konformitas NSC Tiongkok dengan Traktat TACSA ASEAN tersebut, tergambar dalam tabel di bawah ini yaitu:

Tabel 2 Konformitas Strategi Kebijakan dan Diplomasi Keamanan Nasional dan Luar Negeri ASEAN dan Tiongkok

No	Traktat TACSA ASEAN	<i>New Security Concept</i> (NSC) Tiongkok
	Strategi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Keamanan	
1.	<i>Mutual respect for the independence, sovereignty, equality,</i>	

⁸⁸ United Nations "Charter of the United Nations" on 17 November 2014.

	<i>territorial integrity and national identity of all nations.</i>	<i>Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty.</i>
2.	<i>The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion.</i>	<i>Mutual non-aggression (doctrine of non-expansionism).</i>
3.		<i>Peaceful co-existence.</i>
4.	<i>Non-interference in the internal affairs of one another.</i>	<i>Mutual non-interference in each other's internal affairs (doctrine of non-interference).</i>
5.	<i>Settlement of differences or disputes by peaceful means.</i>	<i>Pursuit of confidence building measures (CBMs) amongst states (doctrine of pacific settlement of dispute).</i>
6.	<i>Renunciation of the threat or use of force.</i>	
7.	<i>Effective cooperation among themselves.</i>	<i>Equality and mutual benefit.</i>
8.		<i>Emphasis on mutually beneficial economic cooperation among states.</i>
9.		<i>Establishment of bilateral strategic partnership that are not directed at any third country.</i>

Oleh karena adanya faktor konformitas berupa kekonsistensian dan kesejalaran Traktat TACSA ASEAN dengan strategi kebijakan dan diplomasi keamanan nasional dan luar negeri

Terdapat beberapa konsep yang terkandung dalam NSC sebagai manifestasi

ekstraksi fundamental budaya strategis *Confucian Pacifism*, maka Tiongkok bersedia untuk mengaksesi Traktat TACSA ASEAN. Tiongkok memandang bahwa, dengan adanya faktor konformitas (*conformity*) Traktat TACSA ASEAN dengan NSC Tiongkok tersebut, Tiongkok ingin membangun apa yang disebut dengan *common security identity* mengingat adanya *share similar values*.

Lebih lanjut, dengan adanya *share similar values* tersebut, Tiongkok berusaha untuk membangun *shared understanding* mengenai norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanan baru bersama, sehingga terbentuk apa yang disebut *common security identity* yang *non-coercive identity* guna mencapai kepentingan keamanannya di ASEAN⁹⁰. Dengan adanya *common security identity* tersebut, maka tentunya Tiongkok akan lebih mudah dalam mewujudkan kepentingan keamanannya di ASEAN mengingat adanya kesamaan norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanan yang mencerminkan nilai-nilai universal dan kebijakannya yang notabene mencerminkan pula nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang juga dimiliki oleh ASEAN.

Mengingat pasca berakhirnya Perang Dingin, Tiongkok secara konsisten dan persisten mendorong berbagai pihak termasuk para tetangga-tetangganya di kawasan tanpa terkecuali negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) untuk turut serta mengadopsi

pentingnya arsitektur keamanan kawasan saat ini, sebagai kunci utama bagi terwujudnya keamanan kawasan itu sendiri. Tanpa adanya arsitektur keamanan, keamanan kawasan akan sulit tercapai, dan dikhawatirkan para aktor-aktor akan terjebak pada hegemonisme, ekspansionisme, *power politics*, *arms races* dan aliansi militer dalam mewujudkan kepentingan keamanannya di kawasan.

2. Meningkatkan Pengaruh Budaya Tiongkok di Asia Tenggara

Dalam bukunya *China Goes Global: The Partial Power*, David Shambaugh⁹¹ menjelaskan bahwa, kekuatan utama Tiongkok dalam konteks *soft power*-nya adalah daya tarik budaya itu sendiri (*cultural attractions*). Budaya sebagai sebuah nilai, oleh karenanya, penting kiranya untuk menekankan pada universalitas empat *core value* nilai-nilai budaya Tiongkok yaitu: perdamaian dan harmoni (*peace and harmony*), moralitas (*morality*), etika (*etiquette*) dan kebajikan (*benevolence*). Keseluruhan nilai-nilai tersebut tentunya merupakan sumbangsih terbesar Tiongkok bagi upaya pembentukan nilai-nilai budaya global⁹².

⁹¹ David Shambaugh adalah *George Washington University Professor of Political Science and International Affairs*, dan *Founding Director of The China Policy Program* di *Elliot School of International Affairs George Washington University, AS*. Shambauh juga merupakan *Non-resident Senior Fellow* di *The Center for East Asia Policy Studies* dan *The John L. Thornton China Center Brookings*. Shambaugh merupakan pakar studi Politik Cina, Kebijakan Luar Negeri, Militer, Keamanan dan *Asia's Role in International Affairs*. Shambaugh memperoleh gelar Ph.D dalam bidang Ilmu Politik dari *University of Michigan, AS*.

Pentingnya budaya sebagai *core value soft power diplomacy* Tiongkok ditegaskan oleh Hu Jintao dalam sebuah pidatonya sebagai berikut yaitu:

*We should bring Chinese culture to the world, develop cultural soft power compatible with China's international standing, and increase the influence of Chinese culture in the world*⁹³.

*We must enhance culture as a part of the soft power of our country. We will further publicize the fine traditions of Chinese culture, and strengthen international cultural exchanges to enhance the influence of Chinese culture worldwide*⁹⁴.

Kita harus memperkenalkan nilai-nilai budaya Tiongkok kepada dunia, mengembangkan *soft power diplomacy* yang berbasiskan pada nilai-nilai budaya yang sesuai dengan kedudukan internasional Tiongkok, dan meningkatkan pengaruh budaya Tiongkok di mata dunia internasional.

Kita harus menempatkan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari *soft power diplomacy* Tiongkok. Tiongkok ingin lebih lanjut memperkenalkan tradisi-tradisi terbaik dari warisan budayanya, dan mempromosikan pertukaran nilai-nilai budaya

internasional guna meningkatkan pengaruh budaya Tiongkok di seluruh dunia.

Namun kontemporer ini, daya tarik budaya Tiongkok sebagai *core value soft-power diplomacy*-nya mengalami apa yang disebut dengan *soft power deficit*. Dimana, kehadiran dan pengaruh nilai-nilai budaya Tiongkok secara global masih belum “menggema” dirasakan⁹⁵. Akibatnya, daya tarik budaya Tiongkok, *small in quantity* dan *low in quality*. Hal tersebut disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- a. Terdapat defisit serius dalam konteks budaya Tiongkok dibandingkan dengan negara-negara Barat, budaya Tiongkok berada pada posisi tawar yang rendah.
- b. Adanya keterlambatan demokrasi dalam pembangunan politik di Tiongkok, dan feodalisme yang masih kuat membatasi pembangunan politiknya secara demokratis.
- c. Faktor sentimen nasionalisme yang berlebih⁹⁶.

Akibatnya, Tiongkok mengalami apa yang disebut dengan krisis identitas (*crisis in identity*). Dimana Tiongkok tidak memiliki secara definitif identitas internasional yang jelas, sehingga muncul berbagai *misunderstood* dan *mispersepsi* tentang Tiongkok yang

Prasangka, kesalahpahaman, dan kecurigaan-kecurigaan adalah hal-hal yang biasa dijumpai, sebagai persepsi masyarakat internasional tentang Tiongkok, yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan nilai-nilai dan ideologi, mentalitas Perang Dingin yang masih melekat kuat, dan “kekhawatiran” atas pertumbuhan pesat perekonomiannya⁹⁷.

Dalam bukunya, *Analysis of China's National Interests*, Yan Xuetong⁹⁸ *Tsinghua University Professor of International Relations Department* sekaligus *Direktur Tsinghua University Institute of International Studies*, menjelaskan bahwa salah satu dampak dari *misunderstood* dan *misperception* masyarakat internasional terhadap Tiongkok adalah adanya sesat fikir atau *mischaracterization* mengenai interpretasi nilai-nilai budaya Tiongkok, dimana nilai-nilai budaya Tiongkok ditafsirkan identik (*analog*) dengan nilai-nilai budaya Barat. Dalam konteks keamanan, norma-norma dan prinsip-prinsip budaya strategis keamanan Tiongkok ditafsirkan tidak jauh berbeda dengan Barat, yang notabene *Cultural Realism*⁹⁹. Akibatnya muncul apa yang disebut dengan *China Threat Perception* atau *China Threat Theory* yang

⁹⁷ *Ibid.*, p. 210-211.

⁹⁸ Yan Xuetong merupakan Profesor Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di *Tsinghua University* Cina sekaligus menjabat pula sebagai *Direktur Tsinghua University Institute of International Studies* di Universitas yang sama. Selain itu, Yan juga merupakan ketua editor *The Chinese Journal of International Politics* serta menjabat pula sebagai *Adjunct Professor* di *National Defense University of China* dan *senior research fellow* di *National Security Committee of China*. Yan memperoleh gelar Ph.D dalam bidang Ilmu Politik dari Universitas California di Berkeley Amerika Serikat tahun 1992.

⁹⁹ Yan Xuetong. *Analysis of China's National Interests*. Ed. Monte R. Bullard. United States of

episentrum eksplanasinya adalah *cultural factor* yang bersumber dari *Cultural Institutional Perspective* atau *Cultural Theory*.

Dalam versi termutakhirnya, teori ini berevolusi menjadi beberapa versi teori diantaranya *The China Rise Theory*, *The China Collapse Theory*, *The China Responsibility Theory*, *The China Arrogance Theory*, *The China Pride Theory* dan yang terakhir *The China Unreasonableness Theory*. Berbagai macam teori-teori tersebut, seketika kemunculannya menjadi *mainstream* di kalangan para akademisi dan *decisions-makers* di Barat dalam memandang Tiongkok¹⁰⁰.

Dalam bukunya *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*, Alastair Iain Johnston, *Harvard University Professor of China in World Affairs* menjelaskan bahwa sifat alamiah (*nature*) budaya strategis Tiongkok adalah ekspansionis (*hegemonism*), dan karakteristik utamanya adalah *Cultural Realism*. Oleh karenanya, praktik-praktik kebijakan dan diplomasi keamanannya akan berorientasi pada norma-norma dan prinsip-prinsip budaya *Cultural Realist* guna mencapai tujuan-tujuan keamanannya, dan merespon berbagai macam tantangan yang ada di kawasan. *Cultural Realist* yang karakteristik utamanya sebagaimana terangkum dalam lima hal fundamental yaitu: *hegemonism*, *militarism*, *use of force*, *offensive grand strategy*, *violent means* dan *expansionist* akan menjadi sumber ideasional

baginya dalam menentukan preferensi strategisnya dalam konteks menjaga kepentingan keamanannya di kawasan.

Dalam perspektif sejarah Tiongkok, budaya strategis ini sangat bertolak belakang dengan filsafat *Confucianism* yang selama ini diklaim oleh Tiongkok sebagai budaya strategisnya yang *pacifist* namun *inoperative* dalam realitasnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Johnston sebagai berikut yaitu:

It seems fairly evident that operative Chinese strategic culture does not differ radically from key elements in the Western realpolitik tradition. Indeed, the Chinese case might be classified as a hard realpolitik sharing many of the same tenets about the nature of enemy and the efficacy of violence as advocates of nuclear war fighting on both sides in the cold war, or late nineteenth century social Darwinian nationalist.

Menurut Johnston, tergambar jelas bahwa budaya strategis Tiongkok secara operasionalnya tidak jauh berbeda dari norma-norma dan prinsip-prinsip tradisi budaya *realpolitik* Barat yang *mainstream* dengan norma-norma budaya *Cultural Realist* sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks Tiongkok sendiri, dapat dikategorisasikan sebagai *hard realpolitik* yang kurang lebih memiliki kesamaan ajaran serta prinsip-prinsip mengenai sifat permusuhan (*nature of enemy*), dan mengedepankan efektivitas penggunaan instrumen kekuatan (*doctrine of use of*

force), dan penggunaan ancaman kekerasan (*violent means*) dalam mencapai kepentingan keamanannya¹⁰¹.

Bagi Tiongkok, dengan terikat pada arsitektur keamanan kawasan (*regional security framework*) yakni Traktat TACSA ASEAN tersebut, merupakan strategi yang tepat bagi Tiongkok untuk mengatasi sesat fikir (*fallacy*) mengenai Teori Ancaman Tiongkok (*China Threat Theory*) yang muncul dan berkembang, yang episentrumnya dari Barat pada mulanya. Namun, kini telah menyebar luas ke seluruh dunia tanpa terkecuali di Asia Tenggara itu sendiri.

Oleh karenanya, dengan menjalin kerjasama keamanan dengan ASEAN, melalui keterlibatannya dalam arsitektur keamanan kawasan, Traktat TACSA ASEAN tersebut, Tiongkok ingin meningkatkan pengaruh dan kehadiran nilai-nilai budayanya secara global, khususnya terkait dengan budaya strategis keamanannya. Hal tersebut ditujukan untuk meng-*counteract* pengaruh sesat fikir dan *mischaracterization China Threat Theory* di Asia Tenggara dengan mengintrodusir dan menjunjungtinggi norma-norma dan prinsip-prinsip budaya strategis keamanannya yang *Confucian Pacifism*, guna memperkuat identitas nasionalnya, sebagaimana tercermin pula dalam norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanan ASEAN dalam Traktat TACSA tersebut, seiring dengan kembalinya *Confucian Pacifism* sebagai tradisi berfikir *mainstream*

¹⁰¹ Herbert Yee and Ian Storey. "Introduction." *The China Threat: Perceptions, Myths and Reality*. Ed. Herbert Yee and Ian Storey. London: RoutledgeCurzon, 2002, p. 8-9.

dikalangan para pengambil kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanan luar negerinya pasca Perang Dingin.

Dengan demikian, bagi Tiongkok, diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan mampu *move-on*, mengalami pergeseran pemahaman dan persepsi tentang Tiongkok, agar tidak terlampau *misunderstood* dan *misperception* berkepanjangan, yang selama ini menurut Beijing dijadikan dasar pijakan bersama (*common ground*) untuk “menghakiminya” sehingga citra dan reputasi internasionalnya begitu buruk di mata dunia internasional, tanpa terkecuali di Asia Tenggara.

3. Resolusi Konflik Secara Damai dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan

Dalam tulisannya *ASEAN-China Relations: An International Law Perspective*, Zeng Lingliang menjelaskan bahwa, keputusan Tiongkok untuk terikat dalam arsitektur keamanan kawasan Traktat TACSA ASEAN tersebut, agar Tiongkok mampu berkontribusi positif dan konstruktif bagi stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan, dengan mengupayakan agar tidak terjadi peperangan terbuka dan munculnya konflik-konflik sengket, melalui penyelesaian secara damai (*non-violent means*) tanpa harus menggunakan instrumentasi kekuatan militer atau penggunaan ancaman kekerasan sekalipun (*doctrine of non-use of force*), mengingat TACSA sendiri secara konstitusional mengikat para

prinsip fundamental dan modalitas bagi upaya-upaya penyelesaian konflik secara damai¹⁰².

Sebagaimana tertuang dalam laporan politik Kongres Nasional Partai Komunis Pusat ke-15 tahun 1995 mengenai strategi keamanan Tiongkok dalam konteks resolusi konflik sebagai berikut yaitu:

*In a fairly long period to come, it will be possible to avert a new world war, and secure a favorable, peaceful international environment and maintain good relations with the surrounding countries... Keeping in mind the overall objective to maintain peace and stability, we should settle disputes between China and the surrounding countries through friendly consultations and negotiations... In carrying out the socialist modernization program, we need a long term of peaceful international environment, and above all, we need to maintain good relations with surrounding countries. China's development will not pose a threat to any other country*¹⁰³.

Dalam rentang waktu yang cukup panjang ke depan, dunia dimungkinkan dapat terhindar dari peperangan baru dan menciptakan lingkungan internasional yang penuh damai

¹⁰² Zeng Lingliang. "ASEAN-China Relations: An International Law Perspective." *China-ASEAN Relations: Economic and Legal Dimensions*. Ed. John Wong, Zou Keyuan and Zeng Huaqun. Singapore: World Scientific Publishing, 2006, p. 39-41.

¹⁰³ Zeng Lingliang and Xue Shichang. "China's Policy of Good Neighborliness and China-ASEAN

serta menguntungkan untuk Tiongkok, dan memelihara hubungan yang baik dengan negara-negara sekitar... Perlu diingat bahwa tujuan politik luar negeri Tiongkok adalah untuk memelihara perdamaian dan stabilitas, Tiongkok harus menyelesaikan berbagai konflik-konflik yang terjadi dengan negara-negara sekitarnya melalui konsultasi dan negosiasi... Dalam rangka mewujudkan program modernisasi sosialisannya, Tiongkok memerlukan stabilitas lingkungan internasional dalam jangka waktu panjang, dan di atas itu semuanya, Tiongkok harus memelihara hubungan yang baik dengan negara-negara sekitarnya. Pembangunan Tiongkok tidak akan menciptakan ancaman bagi negara manapun.

Dalam bukunya *China's International Behavior: Activism, Opportunism and Diversification*, Evan S. Medeiros¹⁰⁴ menjelaskan bahwa salah satu prioritas utama tujuan diplomasi keamanan Tiongkok jangka panjang adalah terkait dengan kedaulatan dan integritas teritorialnya¹⁰⁵ (*traditional security issues*). Melindungi kedaulatan dan integritas teritorial adalah *core value* kepentingan nasional Tiongkok, dan menjadi prioritas utama dalam kebijakan

¹⁰⁴ Evan S. Medeiros adalah *senior political scientist* di *RAND Corporation* Washington, DC Amerika Serikat (AS). Medeiros merupakan pakar studi dalam bidang Politik Internasional di Asia Timur, Kebijakan Keamanan Nasional dan Luar Negeri Cina dan Hubungan AS-Cina dan Isu-isu terkait dengan Industri Pertahanan Cina. Medeiros memperoleh gelar Ph.D dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional dari *London School of Economics and Political Science* (LSE), London, United Kingdom. Gelar M.Phil.-nya diperoleh dari *University of Cambridge* dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional juga. Sedangkan gelar M.A.-nya diraih dalam bidang *China Studies* dari *School of Oriental and African Studies* (SOAS) *University of London*.

¹⁰⁵ Evan S. Medeiros. *China's International Behaviors: Activism, Opportunism, and Diversification*. Santa Monica: RAND Corporation, 2009, p. 14-15.

luar negeri dan diplomasi keamanannya, yang bertujuan untuk mengamankan tapal batas Tiongkok (*borders security*), mempromosikan kebijakan re-unifikasi Taiwan, mencegah dan membatasi potensi ancaman-ancaman eksternal terhadap wilayah teritorial Tiongkok (*external threat*), termasuk klaim-klaim teritorial kemaritiman, dan meminimalisir intervensi asing terhadap upaya pembangunan dan politiknya (*political security*).

Tiongkok secara geografis, berbatasan langsung dengan 14 negara, dan memiliki garis tapal batas sepanjang 14.500 kilometer¹⁰⁶. Begitu panjangnya, namun Tiongkok memiliki sejumlah persoalan terkait dengan konflik teritorial atau sengketa wilayah kedaulatan dengan mayoritas negara-negara tetangganya selama lebih dari enam dekade silam, termasuk persoalan tapal batas dan wilayah maritim tanpa terkecuali dengan negara-negara ASEAN yang notabene merupakan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan Tiongkok baik daratan maupun maritim¹⁰⁷.

Merespon konflik-konflik teritorial tersebut, serta mencegah inkursi asing, telah menjadi prioritas utama dalam diplomasi keamanan Tiongkok. Sebagaimana berkaca pada pengalaman sukses Tiongkok, keberhasilannya pada tahun 1980-an mengembalikan Hong Kong dan Macao ke dalam wilayah kedaulatannya melalui upaya-upaya diplomatik tanpa harus mengedepankan penggunaan instrumentasi kekuatan atau penggunaan ancaman kekerasan

¹⁰⁶ Lihat Lampiran 1 hal. 130 mengenai Peta Geografis Tiongkok.

¹⁰⁷ Lihat Lampiran 2 hal. 131 mengenai Peta Geografis Negara-negara ASEAN.

sekalipun (*doctrine of non-use of force*). Tentu saja, yang terpenting, dalam konteks serupa, mengupayakan integrasi Taiwan (*re-unification*) melalui upaya-upaya diplomasi dan negosiasi, merupakan elemen prioritas jangka panjang Tiongkok guna melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya dari campur tangan asing (*foreign intervention*).

Salah satu persoalan utama yang menghambat harmonisitas hubungan diplomatik Tiongkok dan ASEAN adalah konflik kedaulatan wilayah dan integritas teritorial Laut Tiongkok Selatan (Konflik LTS). Konflik LTS ini merupakan konflik klaim tumpang tindih wilayah kedaulatan dan integritas teritorial wilayah kemaritiman antar aktor yang berkonflik (*claimants*). Mengingat konflik ini notabene melibatkan mayoritas negara-negara di Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Tiongkok di satu sisi¹⁰⁸. Kekhawatiran terbesar dari konflik ini sendiri adalah munculnya peperangan terbuka antar aktor yang terlibat, mengingat sejak awal konflik ini terjadi, sudah diwarnai oleh berbagai tindakan-tindakan unilateral antar aktor dalam bentuk konfrontasi militer. Namun belum mengarah kepada peperangan terbuka sebagaimana banyak dikawatirkan oleh kedua belah pihak baik ASEAN maupun Tiongkok.

Dalam upaya meresolusi konflik LTS ini, solusi diplomasi dan negosiasi dengan mengedepankan cara-cara perdamaian (*non-violent means*) dengan mengeliminasi pendekatan *militarism*, belum menjadi perhatian lebih bagi para aktor-aktor yang berkonflik (*claimants*). Diplomasi militer masih menjadi preferensi strategis guna mengamankan kepentingan keamanan masing-masing aktor terhadap klaim kedaulatan dan integritas teritorial LTS. Eskalasi konflik menjadi hal yang tak terelakkan ketika masing-masing *claimants* melancarkan diplomasi unilateralnya melalui konfrontasi militernya, dengan menggelar kekuatan militer di sekitar wilayah yang dipersengketakan sebagai bentuk respon kepemilikannya atas wilayah kedaulatan LTS.

Dalam bukunya *Analysis of China's National Interests*, Yan Xuetong *Tsinghua University Professor of International Relations Department* sekaligus *Direktur Tsinghua University Institute of International Studies*, menjelaskan bahwa salah satu kepentingan strategis Tiongkok dalam konteks keamanannya adalah menghindari konfrontasi militer (*clash of military*) yang dapat memicu munculnya konflik terbuka dalam bentuk peperangan. Salah satu dari dua "mala bahaya" tersebut, selain isu mengenai kemerdekaan Taiwan, adalah konflik kedaulatan dan integritas teritorial Laut Tiongkok Selatan (Konflik LTS) yang merupakan isu keamanan yang setiap saat dapat "menjerumuskan" Tiongkok untuk terlibat dalam peperangan terbuka dengan *claimants* ASEAN. Tiongkok

menyadari bahwa konflik LTS ini tidak dapat diselesaikan dengan strategi *hard power* dengan menggunakan instrumentasi kekuatan atau penggunaan ancaman kekerasan sekalipun. Melainkan memerlukan strategi *non-militarism* dan *non-violent means* melalui upaya-upaya diplomasi dan negosiasi¹⁰⁹.

Terkait dengan keputusan Tiongkok untuk terikat pada arsitektur keamanan kawasan (*regional security framework*) Traktat TACSA ASEAN tersebut, dan korelasinya terhadap konflik LTS tersebut, Tiongkok ingin memperkuat dan membuktikan pula komitmen politik-keamanannya untuk tetap terikat penuh pada perjanjian *Code of Conduct for the South China Sea (CoC)* yang telah disepakati dan ditandatangani sebelumnya oleh Tiongkok pada 4 November 2002 bersama negara-negara ASEAN yang tertuang dalam *the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)* yang mengatur mengenai berbagai tindakan-tindakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Konflik LTS yang menolak penggunaan kekuatan (*doctrine of non-use of force*) dan penggunaan ancaman kekerasan (*non-violent means*) dalam bentuk konfrontasi militer dalam upaya penyelesaian sengketa atas klaim tumpang tindih wilayah kedaulatan dan integritas teritorial wilayah kepulauan Kepulauan Spratly dan Prataol

DoC sendiri merupakan perjanjian politik-keamanan antara Tiongkok dan ASEAN yang bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik dengan mengurangi ketegangan-ketegangan yang timbul, mempromosikan kerjasama, membangun rasa saling percaya antara Tiongkok dan ASEAN (*mutual trust*), serta menciptakan situasi yang kondusif bagi proses penyelesaian sengketa konflik LTS melalui negosiasi perdamaian, konsultasi, kerjasama, dan upaya *confidence building measures* (CBMs). Selain tujuan di atas, DoC juga memuat tentang sejumlah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindakan-tindakan dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik guna mengurangi ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam upaya penyelesaian sengketa yurisdiksi dan teritorial di LTS (CoC). Sebagaimana dikemukakan dalam protokol DoC pada paragraf ke-4 yang menyatakan sebagai berikut yaitu:

The parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea¹¹⁰.

Pihak-pihak yang berkonflik diminta untuk mengupayakan penyelesaian konflik teritorial dan yurisdiksi secara damai, tanpa mengancam penggunaan kekerasan atau penggunaan kekuatan militer, namun melalui upaya konsultasi dan negosiasi secara kondusif antar para aktor, berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang secara universal diakui, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1982 yang mengatur tentang Hukum Laut.

Secara lebih rinci, sebagaimana yang dikemukakan pada protokol DoC tersebut, memuat serangkaian prinsip-prinsip utama (*the key principles*) yang mengatur tentang tindakan-tindakan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik LTS atau/ yang dikenal dengan CoC sebagai berikut yaitu:

- a. *Prohibition of the use of force and threats of force* (Prohibisi penggunaan kekuatan dan ancaman penggunaan kekuatan).
- b. *Exercise of self-restraint* (Sifat menahan diri).
- c. *Peaceful settlement of international disputes* (Penyelesaian secara damai konflik-konflik internasional).
- d. *Search for and adoption of confidence building measures* (Membangun dan mengadopsi upaya-upaya pembangunan rasa saling percaya).
- e. *Cooperation* (Kerjasama).
- f. *Consultation and consensus* (Musyawarah mufakat)

g. *Respect for the freedom of international air and maritime navigation*¹¹¹ (Penghormatan terhadap kebebasan navigasi maritim dan wilayah udara internasional).

Terikatnya Tiongkok dalam arsitektur keamanan kawasan Traktat TACSA ASEAN tersebut, maka semakin menguatkan keinginan Tiongkok untuk meningkatkan rasa saling percaya (*mutual trust*), kepercayaan diri (*confidence*), dan memajukan kerjasama diantara keduanya, serta Tiongkok bersedia untuk menerima *code of conduct* (CoC) konflik LTS yang selama ini dipersengketakan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN *claimants*.

Konflik ini sendiri merupakan sumber ketegangan serius dan berkepanjangan antara Tiongkok dan ASEAN yang melibatkan sejumlah negara-negara ASEAN khususnya Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Tiongkok sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam konflik LTS guna menegakkan integritas teritorial dan kedaulatannya terhadap negara-negara *claimant* lainnya di Asia Tenggara. Konflik LTS ini merupakan “batu sandungan” utama pasca berakhirnya Perang Dingin dalam upaya Tiongkok membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan ASEAN dalam konteks hubungan keamanan bilateralnya,

¹¹¹ Nguyen Hong Thao. "The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: A Vietnamese Perspective 2002–2007." *Security and International Politics in the South China Sea: The Role of China, Malaysia, Brunei, Filipina, Indonesia, Vietnam, and Self-Determination*. London: New

mengingat “kecurigaan” dan “kekhawatiran” ASEAN atas Tiongkok begitu “melekat erat”.

Dengan demikian, diaksesinya Traktat TACSA oleh Tiongkok tersebut, merupakan suatu langkah *re-assurance* dan *counter-constraintment* Tiongkok terhadap ASEAN, sebuah langkah konstruktif Tiongkok guna menghilangkan “kecurigaan” dan “kekhawatiran” ASEAN atas berbagai niatan dan tujuan Tiongkok (*Beijing's intention*) di kawasan, melalui kesediaannya untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dengan ASEAN. Secara esensial, TACSA itu sendiri merupakan konsensus arsitektur keamanan kawasan yang bertujuan untuk memanifestasikan dan mempromosikan stabilitas politik dan keamanan, serta memelihara perdamaian antar negara di kawasan.

4. Tiongkok sebagai Kekuatan Utama Dunia yang Bertanggungjawab

Dalam tulisannya *China's Policy of Good-Neighborliness and China-ASEAN Relations*, Cao Yunhua dan Xu Shanbao menjelaskan bahwa, keputusan Tiongkok menjalin kerjasama keamanan dengan ASEAN melalui keterikatannya dalam arsitektur keamanan kawasan Traktat TACSA ASEAN tersebut, merupakan upaya Tiongkok untuk menunjukkan pada negara-negara tetangganya termasuk ASEAN dan dunia bahwa Tiongkok tidak

banyak dipersepsikan oleh berbagai pihak¹¹². Tiongkok ingin menunjukkan pada ASEAN mengenai kebangkitan damai Tiongkok (*China's peaceful rise theory, heping jueqi*, teori kebangkitan damai Tiongkok) bahwasanya, politik luar negeri Tiongkok yang lebih bersahabat (*more friendly*), dan tidak mengancam (*unthreatening*) adalah inti dari kebijakan kebangkitan damainya. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini sebagai berikut yaitu:

Tiongkok akan menjadi *a responsible major power (fuzeren de dagao)*, sebuah kekuatan utama yang bertanggungjawab, bukan justru sebaliknya, menjadi kekuatan hegemonik baru yang revisionis (*revisionist policy*). Tiongkok tidak akan menjadi ancaman (*defensive grand strategy*), sekalipun telah menjadi kekuatan utama dunia (*a major power*). Tiongkok juga tidak akan menjadi kekuatan hegemonik baru yang mendominasi politik dunia (*no hegemonism*).

Alih-alih sebagai ancaman (*threat*), kebangkitan Tiongkok akan memberikan kesempatan (*opportunity*) yang bermanfaat bagi pembangunan dunia (*a benign rising power*). Lebih lanjut, Tiongkok tidak bermaksud untuk menentang tatanan internasional yang telah ada (*status quo*), dan oleh karenanya, tidak akan menggunakan instrumentasi-instrumentasi kekerasan (*doctrine of non-use of force*) untuk menghancurkannya (*revisionist policy*).

¹¹² Cao Yunhua and Xu Shanbao, *op.cit.*, p. 11.

Globalisasi sangat penting bagi Tiongkok, guna menunjang upaya modernisasinya. Tiongkok tidak akan menguasai sumber daya negara lain dengan ekspansi (*doctrine of non-expansionism*), atau membentuk koloni (*colonialization*). Keseluruhan hal tersebut penting, agar Tiongkok mampu mewujudkan tiga perdamaian yaitu: perdamaian internasional, harmoni internal, dan rekonsiliasi dengan Taiwan¹¹³.

Terkait dengan kebangkitan damai Tiongkok, Perdana Menteri Li Peng dalam sebuah wawancara meng-*counteract* mengenai mitos hegemonisme Tiongkok sebagaimana dipersepsikan dalam *The China Threat Theory* pada Desember 1997 sebagai berikut yaitu:

In order to realize China's development strategy and its basic objective of raising the level of material well-being and cultural life of the Chinese people, we need on the one hand, a stable and harmonious domestic political environment, and on the other hand, a peaceful international environment, especially a good environment along China's borders. These are the prerequisites for China's continuing development. The Chinese people highly value peace and stability. We oppose great power hegemony, and China as a socialist state will never seek hegemony nor a sphere of influence. This is a

*solemn promise made by the Chinese government to the world. China doesn't pose a threat to any country or region. Some peoples spread The China Threat allegations for other purposes. China's military capability and posture is defensive, if other people don't attack us, we will not attack others*¹¹⁴.

Dari pernyataan Perdana Menteri Li Peng tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok sebagai kekuatan yang sedang bangkit tidak akan menjadi kekuatan hegemonik, dan mengejar tujuan hegemoni, sebagaimana dijelaskan di bawah ini yaitu¹¹⁵:

- a. Tiongkok adalah sebuah negara-bangsa yang cinta damai (*peace-loving nation*), dan memerlukan stabilitas lingkungan internasional yang penuh kedamaian guna mewujudkan tujuan pembangunan perekonomiannya.
- b. Tiongkok bukanlah sebuah kekuatan hegemonik, dan tidak akan mengejar tujuan hegemoni di kawasan.
- c. Pembangunan kapabilitas militer Tiongkok adalah untuk tujuan defensif (*defensive grand strategy*), dan tidak akan menciptakan ancaman bagi para tetangganya (*offensive grand strategy*).
- d. Tiongkok tidak akan menggunakan kekuatan nuklirnya untuk menghancurkan negara-negara yang tidak memiliki

¹¹⁴ Herbert Yee and Zhu Feng. "Chinese Perspectives of the China Threat: Myth or Reality?" *The China Threat: Perceptions, Myths, and Reality*. Ed. Herbert Yee and Ian Storey. London:

kekuatan nuklir, dan Tiongkok bahkan tidak menempatkan satupun tentaranya atau memiliki basis militer di luar negeri.

Sebagaimana dikemukakan pula oleh Hu Jintao dalam salah satu pidatonya mengenai orientasi kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanan Tiongkok sebagai berikut yaitu:

The very purpose of China's foreign policy is to maintain the world peace, and to promote the common development. China always practices what it preaches. Persisting in building good-neighborly relationships (good-neighborliness policy), and partnership with the neighboring countries. We pursues a policy of bringing harmony, security and prosperity to neighbors, and dedicates ourselves to strengthen mutual trust and cooperation with the fellow Asian countries, easing up hot spot tensions, and striving to maintain peace and tranquility in Asia¹¹⁶.

Orientasi kebijakan luar negeri Tiongkok saat ini adalah bertujuan untuk memelihara perdamaian dunia, dan memajukan pembangunan bersama. Tiongkok senantiasa menjalankan apa yang diyakininya. Secara berkesinambungan membangun hubungan bertetangga baik, dan membangun hubungan kemitraan dengan para tetangganya. Tiongkok akan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang menciptakan harmoni, keamanan dan

¹¹⁶ Full Text of Hu Jintao's Speech at BFA Annual Conference 2004. 24 April 2004. 22 November 2014. <<http://www.china.org.cn/english/features/93897.htm>>.

kesejahteraan bagi para tetangganya, dan mengabdikan hal tersebut untuk memperkuat rasa saling percaya satu sama lainnya, dan membangun hubungan kerjasama dengan para mitra-mitranya di Asia, meredakan berbagai ketegangan-ketengan yang ada, dan berupaya untuk memelihara perdamaian dan ketentraman di Asia.

Lebih lanjut, menurut Evan S. Medeiros, dalam bukunya *China's International Behavior: Activism, Opportunism and Diversification*, menjelaskan bahwa Tiongkok sebagai *a responsible major power*, tidak akan mengejar kebijakan luar negeri yang revolusioner (*revisionist policy*), yang bertujuan untuk memperoleh wilayah teritorial baru (*no territorial conquer*), membangun koalisi penyeimbang (*balancing coalitions*), atau menciptakan model-model pembangunan ekonomi alternatif, atau keamanan global (*military blocs*). Selain itu, Tiongkok tidak akan mengubah atau merombak secara radikal struktur sistem internasional yang ada saat ini, baik berupa *global rules*, norma-norma dan institusi-institusi yang ada (*status quo*). Namun justru dengan kondisi saat ini, Tiongkok *happy* terlibat dalam arsitektur sistem internasional yang telah ada, dan berusaha untuk memajukan kepentingan keamanannya, sebuah pendekatan yang sekiranya hingga saat ini terbukti cukup produktif bagi Beijing¹¹⁷.

¹¹⁷ Evan S. Medeiros, *op cit.*, p. xx

Tiongkok menyadari bahwa seiring dengan kebangkitannya dan peningkatan kekuatannya, khususnya militer dan ekonomi, telah menciptakan apa yang disebut dengan persepsi ancaman Tiongkok (*Zhongguo weixielun, China Threat Perception, China Threat Theory*). Persepsi ancaman Tiongkok di Asia Tenggara sendiri, selain disebabkan oleh lemahnya pengaruh nilai-nilai budaya Tiongkok, juga disebabkan salah satunya karena faktor geo-politik dan geo-ekonomi Tiongkok. Mengingat mayoritas negara-negara tetangga Tiongkok di Asia Tenggara notabene adalah *small* dan *weak states*, sehingga mereka merasa “khawatir” (*uneasy*) dan “mencemaskan” (*having worries*) perihal kebangkitan Tiongkok¹¹⁸.

Oleh karenanya, bagi Tiongkok, dengan menjalin kerjasama keamanan dengan ASEAN melalui keterlibatannya dalam arsitektur keamanan kawasan yakni Traktat TACSA ASEAN tersebut, merupakan upaya *re-assurance* dan *counter-constraints* Tiongkok terhadap persepsi hegemonisme Tiongkok terhadap ASEAN yang bertujuan sebagai berikut yaitu:

- a. Memitigasi dan mengeliminasi persepsi ancaman Tiongkok terhadap ASEAN. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki *image* Tiongkok guna mengurangi “kekhawatiran” akan suatu Tiongkok yang agresif dan mengancam.

- b. Mendorong negara-negara ASEAN untuk tidak terjebak dalam situasi dilema keamanan (*security dilemma*), sehingga tidak terjadi *arms races* di Asia Tenggara.
- c. Mengurangi adanya ketidakpercayaan politik ASEAN (*political mistrust*) terhadap Tiongkok.
- d. “Melepaskan diri” dari beban-beban masa lalu (*historical legacy*).
- e. Membangun lingkaran kepercayaan (*trust establishment*) dan niatan baik (*good-will*), dengan mengembangkan hubungan kerjasama secara terbuka dengan Tiongkok dalam segala sektor guna memajukan stabilitas politik dan keamanan kawasan, dan menciptakan kesejahteraan bersama (*common welfare*).

Mengingat selama ini, hambatan utama dalam hubungan keamanan Tiongkok dengan ASEAN adalah adanya sikap saling “mencurigai” (*mutual suspicious*) sebagai akibat absensinya rasa saling percaya (*absence of mutual trust*) diantara keduanya karena minusnya *foundation of trust* pasca berakhirnya Perang Dingin¹¹⁹.

¹¹⁹ Nur Rachmat Yuliantoro, *op.cit.*, hal. 110.